

**PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**

*P. Eko Prasetyo \*)*

**Abstrak**

Tujuan utama setiap kebijakan negara yang sedang membangun termasuk di Indonesia adalah diarahkan untuk menghilangkan masalah-masalah pokok yang kini masih fundamental di negara Indonesia yakni: masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan arus urbanisasi berlebih di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Salah satu upaya yang dapat dijadikan solusi ke arah pengurangan masalah tersebut adalah pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena, banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan arus urbanisasi berlebih.

**Kata kunci:** Peran UMKM, kemiskinan, dan pengangguran.

**Pendahuluan**

Sejak Februari 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanakan kebijakan program aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM. Berdasarkan dengan kebijakan program tersebut, tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tekad tersebut telah dijadikan sebagai tema sentral pembangunan nasional Indonesia. Tujuan mendasar dari program kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan angka pengangguran dari 9-10 persen jumlah penduduk menjadi kurang dari 6 persen serta mengurangi jumlah orang miskin dari 15,97 persen menjadi 8,2 persen dalam waktu lima tahun pemerintahannya.

Kebijakan penurunan jumlah orang miskin telah menjadi komitmen dalam tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), yang telah dideklarasikan dan ditandatangani oleh 189 negara termasuk Indonesia sejak 10 September tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya dari delapan program yang dideklarasikan tersebut adalah tekad dan komitmen untuk mengurangi jumlah penduduk

---

\*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

miskin menjadi separuh pada tahun 2015. Kemudian, pada 10 September 2005 program MDGs tersebut telah diadakan evaluasi dan ditargetkan sebanyak 18 goals baru yang didasarkan pada ketersediaan data yang dapat didokumentasikan negara untuk mengukur kemajuan internasional, sehingga pada tanggal dan tahun tersebut yang kini sering dikenal sebagai Hari Gelang Putih Internasional ke dua.

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini, keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7% dan ekspor non migas hanya sebesar 15%. Namun, UMKM tetap masih menyumbangkan 99% dalam jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (BPS, 2001).

Kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pemerintah telah dan sedang berupaya untuk membangun dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan himbauan penambahan jumlah kredit yang diberikan kepada UMKM, tujuannya adalah agar keberadaan UMKM ke depan semakin berkembang, sehingga mampu membantu program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintah baru sadar setelah terjadi krisis, bahwa kebijakan pemerintah selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh, sehingga ke depan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangan semakin berat. Krisis ternyata membuat kita menjadi sadar. Ada dua pelajaran penting yang dapat ditarik dari kejadian krisis ekonomi sejak 1997 lalu. **Pertama**, kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri,

tetapi bertumpu pada utang dan impor, ternyata sangat rentan terhadap faktor eksternal dan membawa negara Indonesia ke dalam krisis yang berkepanjangan. *Kedua*, kebijakan pendekatan pembangunan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah ternyata tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi (*equity social*) yang memiliki fondasi yang kukuh, tetapi cenderung menghasilkan struktur ekonomi yang hanya didominasi oleh usaha besar. Padahal, usaha besar ini umumnya hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang saja yang notabene dengan kinerja yang rapuh, karena sangat besar ketergantungan dengan impor dan hutang.

Sejak saat itu, setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (tidak bisa tidak), karena harus terkait dengan kegiatan banyak orang (rakyat Indonesia). Salah satu bentuk aktualisasi ekonomi rakyat adalah UMKM termasuk koperasi, karena keberadaan UMKM dan koperasi memang merepresentasikan ke dua pelajaran di atas. Artinya, UMKM menjadi salah satu perwujudan kongkrit dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi tumpuan dan harapan “(*buffer*)” di saat perekonomian Indonesia dilanda krisis.

### **Fungsi dan Peran UMKM dalam Struktur Perekonomian Indonesia**

Fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi. Sekalipun, fungsi dan peran UMKM sangat penting namun, hingga saat ini belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia. Sementara itu, teori yang ada dari Barat tidak dapat dipaksakan mentah-mentah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa ciri-ciri spesifik, yaitu UMKM sebagai salah satu organisasi ekonomi/bisnis yang memiliki struktur sangat sederhana, sedikit aktivitas yang diformalkan, teknologinya sederhana, manajemennya lentur, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana (bahkan sering tidak memiliki) serta tanpa elaborasi.

Definisi UMKM sendiri masih terdapat banyak versi seperti pada Tabel 1 di bawah ini. Beberapa lembaga dan para peneliti telah mendefinisikan UMKM dengan pengertian yang berbeda. Namun, kita tetap harus sadar bahwa salah satu ciri UMKM memang bentuknya beragam, yang penting perbedaan tersebut masih dapat ditelusuri konsistensinya. Dengan mencermati batasan tersebut, profil dan peran UMKM di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada tahun 2002, dari sekitar 40 juta pelaku usaha, 39 juta diantaranya usaha mikro, 640 ribu unit usaha kecil, 70 ribu usaha menengah dan 11 ribu usaha besar. (Krisnamurti, 2003).

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan; modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, dan teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah seperti: persoalan perijinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan.

Sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini tahun 2008 struktur keberadaan UMKM di Indonesia tetap sangat dominan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 ada sebanyak 38,9 juta unit usaha pelaku UMKM di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1998 di Indonesia masih terdapat 36,8 juta unit pelaku usaha di mana 99% lebih adalah pelaku UMKM. Pada saat itu keberadaan UMKM telah menyerap 64,3 juta orang dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 58,2%. Dari total UMKM yang ada, 80% belum pernah atau tidak mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Padahal, keberadaannya 96% lebih tahan

terhadap krisis ekonomi, diantaranya sebanyak 65% tidak terpengaruh krisis, serta sebesar 31% mengurangi usaha, dan hanya 4% saja yang usahanya berhenti.

**Tabel 1.**  
**Ragam Pengertian UMKM Menurut Beberapa Lembaga dan Peneliti**

Lembaga	Istilah	Batasan Pengertian Secara Umum
UU No. 9/95 (Usaha Kecil)	Usaha Kecil	Aset $\leq$ Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan atau Omset $\leq$ Rp 1 milyar per tahun
INPRES No.10/1999	Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp 200 juta – Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja $<$ 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset $<$ Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset $<$ Rp 1 milyar/tahun atau independen
	Usaha Menengah	Aset $>$ Rp 200 juta atau Omset Rp 1–10 milyar per tahun
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri
	Usaha Kecil	Aset $<$ Rp 200 juta atau Omset Rp 1 milyar
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industri, Aset $<$ Rp 5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa), Aset $<$ Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan atau Omset $<$ Rp 3 milyar per tahun.
Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja $<$ 10 orang, Aset $<$ \$100.000 atau Omset $<$ \$100.000 per tahun
	Usaha Kecil	Pekerja $<$ 50 orang, Aset $<$ \$ 3 juta atau Omset $<$ \$ 3 juta per tahun
	Usaha Menengah	Pekerja $<$ 300 orang, Aset $<$ \$ 15 juta atau Omset $<$ \$ 15 juta per tahun
Staley & Morse (Modern Small Industry)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang
	Usaha Kecil	Pekerja 10 – 49 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 50 – 99 orang
Anderson Tommy D. (University of Gothenberg Sweden)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang (Usaha Kecil I)
	Usaha Kecil	Pekerja 10 – 19 orang (Usaha Kecil II)
	Usaha Menengah	Pekerja 100 – 199 orang (Besar – kecil) Pekerja 201 – 499 orang (Kecil – menengah) Pekerja 500 – 999 orang (Menengah – menengah) Pekerja 1000 – 1999 orang (Besar – menengah)
Prasetyo P. Eko (Peneliti)	Usaha Mikro	Pekerja 1 – 9 orang (industri kerajinan rumah tangga)
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 20 orang (industri kecil dengan mesin) Pekerja 10 – 49 orang (industri kecil tanpa mesin)
	Usaha Menengah	Pekerja 50 – 99 orang (industri menengah)

Sumber: Krisnamurti, (dalam Yustika, 2005)

Kemudian, pada tahun 2003 dari sekitar 40 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia, sebanyak 39,8 juta atau 99,5% adalah pelaku UMKM. Dari sejumlah UMKM tersebut diantaranya 93% merupakan usaha tani dan usaha lain yang masih terkait dengan pertanian termasuk kerajinan rakyat dan petani gurem. (Krisnamurti, 2003). Dari sisi penyerapan tenaga kerja, keberadaan UMKM mampu menyediakan 97% kesempatan kerja, serta yang terkait dengan distribusi barang mencapai 70% dan sebagai produsen sebanyak 65%, yakni, produsen yang memproduksi barang dan jasa yang diterima masyarakat, (Bobo, 2003).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Desember 2007, pelaku UMKM di Indonesia telah mencapai 45 juta lebih, namun baru 15 juta yang mendapatkan pembiayaan dari bank. Posisi kredit UMKM secara nasional mencapai Rp 502,79 triliun atau 50,2% terhadap kredit perbankan nasional yang sebesar Rp 1.000,02 triliun. Namun, posisi tersebut lebih kecil dibandingkan data akhir tahun 2006 yang mencapai 52%. Padahal kredit UMKM umumnya hanya di bawah plafon Rp 5 milyar. Karena untuk kredit di atas Rp 5 milyar disebut sebagai jenis kredit korporasi.

Kredit korporasi umumnya digunakan untuk proyek infrastruktur, energi, minyak dan gas. Kredit korporasi adalah kredit untuk usaha besar. Sedangkan, kredit UMKM yakni terdiri dari kredit menengah (Rp 500 juta – Rp 5 milyar), kredit kecil (Rp 50 juta – Rp 500 juta), dan kredit mikro di bawah Rp 50 juta. Porsi kredit untuk UMKM sepanjang tahun 2007 terus menurun, karena perbankan lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor korporasi yang berskala besar. Artinya, jika pemerintah benar-benar bertekad ingin memberdayakan UMKM, maka kredit untuk UMKM segera ditingkatkan kembali. Nampaknya, untuk menanggapi upaya ini kini pemerintah telah membentuk dan mendirikan bank khusus untuk menangani kredit UMKM dengan nama Bank UMKM yang pada tahun 2008 ini menurut Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali sudah jadi dan tinggal beroperasi.

Dengan demikian, kredit perbankan belum dapat dikatakan efektif karena belum berhasil mengembangkan UMKM seperti yang diharapkan. Padahal, permasalahan yang dihadapi UMKM dari mulai kualitas produk, manajemen, hingga sampai pemasarannya sangat kompleks. Oleh karena itu, kebijakan BI pada tahun 2008 ini akan menurunkan aktiva tertimbang menurut resiko kredit untuk rakyat (ATMR-KUR) menjadi sebesar 30%. Selain itu BI juga mewajibkan bank melakukan pembinaan

terhadap pelaku UMKM agar usaha mereka berkesinambungan dan tidak berhenti di tengah jalan, (Kompas, 25 Februari 2008).

Kredit UMKM memang memiliki kelebihan dan kelemahan di mata bankir. Kelemahannya, bank membutuhkan jaringan luas dan sumber daya manusia yang besar untuk menjangkau serta membina pelaku UMKM sampai ke pelosok daerah. Sedangkan kelebihanannya, kredit jenis UMKM ini memiliki resiko rendah dan menjanjikan margin keuntungan yang besar. Memiliki resiko yang rendah karena penyaluran kreditnya terdistribusi ke banyak pihak. Tetapi, kelemahannya biaya administrasi menjadi lebih banyak dan besar. Justru inilah tantangan buat para bankir di Indonesia jika mereka ingin membantu UMKM secara lebih nyata.

### **Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Sasaran dan tujuan akhir program pembangunan di Indonesia pada saat ini (RPJM 2005-2009) adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain terefleksi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan pada akses pelayanan-pelayanan dasar. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran indikator ekonomi makro yang menjadi arah strategi pelaksanaan kebijakan dalam tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 yaitu: (a) percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) penciptaan lapangan pekerjaan; dan (c) penanggulangan kemiskinan.

Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Amarta Sen (Peraih Nobel Ekonomi Kesejahteraan, 1998), seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang ditentukan oleh "nilai diri". Bagi sebagian orang, nilai diri

yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat diatasi dengan hanya sekedar memperbesar produksi (laju pertumbuhan ekonomi) saja. Dengan demikian, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja serta peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) dapat diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat dalam motif ini. (Prasetyo, 1998, 2007). Oleh karena itu, masalah memanusiaikan manusia, pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi, dan nasionalisme pengamanan masa depan orang miskin harus menjadi fokus utama setiap kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini dan ke depan.

Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di Indonesia, karena pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan *output*. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Sayangnya, selama tiga tahun program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan hingga tahun 2008 ini, nampak hanya bagaikan seremoni belaka, karena keberadaan UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang sama bahkan selama tahun 2007 hingga awal tahun 2008 nampak ada kemunduran dalam memberdayakan UMKM. Salah satu buktinya, kredit untuk UMKM menurun dan banyak UMKM masih kesulitan akses ke bank untuk mendapatkan kredit, (Kompas, 25 dan 29 Februari 2008). Padahal, sudah sepuluh tahun lebih BI telah mewajibkan perbankan menyalurkan kreditnya untuk usaha kecil minimal 20% dari total.

Bukti lain, tahun 2008 target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan sebesar 6,8 persen dan kini pada bulan Februari 2008 telah dikoreksi kembali menjadi 6,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan memberikan peluang besar bagi angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas baru dapat tercapai jika disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran,

serta mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan. Oleh karena itu, upaya penurunan tingkat pengangguran harus dilakukan melalui langkah-langkah penajaman prioritas pembangunan terutama pada sektor-sektor yang mempunyai penyerapan tenaga kerja cukup tinggi seperti UMKM. Namun sayang, pada saat ini belum nampak ada upaya keras dan komitmen nyata pemerintah dalam peningkatan fungsi dan peran UMKM, baik dalam bentuk pemberdayaan yang secara *empowering*, *enabling* maupun *protecting*, maka target dalam tahun 2008 yakni tingkat pengangguran yang diharapkan dapat diturunkan hingga mencapai kisaran 8-9 persen saja tidak akan tercapai. Dampak selanjutnya, target 6 persen pencapaian jumlah pengangguran diakhir 2009 dapat terancam gagal.

Masalah besar lain yang kini masih dihadapi bangsa Indonesia pada masa pemerintah SBY adalah dihadapkan pada pencapaian penduduk miskin yang masih sebesar 38 juta atau 16% dari total jumlah penduduk pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk mereka yang dikategorikan setengah miskin. Padahal, masalah kemiskinan senantiasa berkorelasi “positif” dengan tingkat pengangguran, maka jika pemerintah gagal mengatasi pengangguran akan berdampak semakin gagal dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Bukti ini dapat dilihat pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2008. Sesuai dengan RKP 2008, pemerintah baru mampu menetapkan sasaran-sasaran indikatif penurunan tingkat pengangguran menjadi sekitar 8,0-9,0 persen (dari 10,7 persen dalam tahun 2007) dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 14,2 persen - 16,0 persen (dari 16,6 persen dalam tahun 2007). Padahal, tekad pemerintah ingin menurunkan jumlah pengangguran tinggal 6 persen dan kemiskinan tinggal 8 persen di akhir jabatannya pada tahun 2009. Jelas tekad ini terasa semakin sulit tercapai. Inilah salah satu dampak besar yang cukup signifikan akibat pemerintah saat ini belum serius dan belum secara lebih nyata dalam pemberdayaan peran UMKM. Pemihakan kepada ekonomi rakyat berarti memberikan perhatian khusus pada keberadaan ekonomi rakyat khususnya UMKM. Wujudnya adalah langkah-langkah strategis untuk memperluas akses mereka (ekonomi rakyat Indonesia) kepada sumber daya pembangunan. Pemihakan kepada ekonomi rakyat bukannya setiap ada masalah kekurangan sumber daya di Indonesia diselesaikan dengan cara impor atau hutang, karena cara ini justru mematikan ekonomi rakyat Indonesia termasuk UMKM.

Tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin tidak mudah, dan membantu masalah UMKM tidaklah cukup dengan bantuan kredit saja, maka pemihakan kepada ekonomi rakyat secara lebih serius dan secara nyata adalah mutlak suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran. Disamping itu, semua pihak harus menyadari bahwa pengangguran sebenarnya dapat terjadi bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja itu ada, hanya orang yang mau dan mampu untuk itu tidak ada. Bayangkan, jika banyak alumni perguruan tinggi terkemuka tidak mendapatkan kerja di kantor, mereka mau dan bersedia bekerja sambil menolong saudaranya yang tinggal di pedesaan dalam bidang pertanian maupun industri kecil kerajinan. Mereka jelas akan lebih cepat memperoleh pekerjaan. Sebaiknya, para alumni perguruan tinggi di Indonesia lebih memikirkan bagaimana mengatasi pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dengan memberdayakan UMKM untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, maka dampaknya akan positif, artinya masalah kemiskinan dan pengangguran lambat laun akan dapat dikurangi secara signifikan.

Melalui langkah-langkah strategi gerakan program sarjana pulang ke desa, juga dapat mengurangi arus urbanisasi berlebih di kota-kota besar, sehingga masalah-masalah pengangguran baik di kota dan di desa juga dapat dikurangi. Selanjutnya, dengan banyak sarjana pulang ke desa, pembangunan di daerah-daerah pedesaan akan lebih cepat maju, sehingga masalah kemiskinan di desa juga dapat ditekan. Selain itu, dengan semakin cepatnya pembangunan di daerah-daerah pedesaan lambat laun juga akan mampu mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan antara orang kota dan desa.

Tujuan kebijakan dari konsep pengembangan wilayah terpadu dengan melalui program gerakan sarjana pulang ke desa adalah untuk ikut memberdayakan keberadaan UMKM yang sebagian besar berada di pedesaan. Sasaran dari konsep kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang fundamental di atas, yakni melalui upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai pemerataan pembangunan antar daerah. Melalui konsep ini diharapkan dapat tercapai keseimbangan pembangunan antara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan pemerataan antar daerah di Indonesia. Namun, sayang program ini juga belum dilakukan secara serius, sehingga masih belum menarik para

sarjana baru untuk membangun desanya. Kapan bangsa ini akan serius? Hanya Tuhan Yang Maha mengetahui jawabannya.

### **Kesimpulan dan Saran**

Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuannya lebih baik dan dimamis dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan, dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah kenyataan hidup.

Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal tetap masih masalah utama tetapi, bukanlah selalu menjadi masalah yang pertama, karena pada umumnya masalah kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama hasil produksi laku keras di pasaran dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai modal yang berputar. Sebaliknya, sekalipun modal usaha besar dan dapat meningkatkan kapasitas produksi tetapi, jika pangsa pasarnya terbatas, maka akan lebih dekat dengan kerugian dan kebangkrutan.

Melihat kenyataan itu, maka kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan modal usaha tidaklah salah dan tetap harus diteruskan dan ditingkatkan, sebab UMKM identik dengan “(*Usaha Memang Kurang Modal*)”. Tetapi, sadarlah bahwa keberadaan UMKM itu beragam dan tidak selamanya masalah utama dan pertama yang dibutuhkan oleh UMKM adalah masalah permodalan. Bisa jadi masalah utama dan pertama yang sedang dihadapi oleh UMKM adalah masalah terbatasnya faktor pemasaran termasuk masih terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya

daya saing, maka masalah inilah yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya program kebijakan yang baik untuk diterapkan dalam pemberdayaan UMKM adalah bersifat simultan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bobo, Julius, 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Cidesindo, Jakarta.
- Brata, Gunadi Aloysius, 2003. *Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Rakyat, No. 8, Tahun II, November.
- Krisnamurti, Bayu, 2003. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Ekonomi Rakyat dengan Cara Berekonomi Sendiri*. Pusat Studi Pembangunan, IPB, Bogor.
- Kompas, 2008. *Porsi Kredit UMKM Menurun*. Kompas Jumat, 22 Februari, 2008.
- Kompas, 2008. *Fokus Ekonomi Rakyat; Masalah Besar di Usaha Kecil*. Kompas Jumat, 29 Februari, 2008.
- Partomo, Titik S., dan Abd. Rachman S., 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, P. Eko, 1998. *Strategi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Bambu Sebagai Upaya Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan*. Laporan Penelitian, Kopertis V Yogyakarta.
- Prasetyo, P., Eko, 2002. *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Ekonomi Rakyat*. Topik Khusus, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung.
- Prasetyo, P. Eko, 2007, "Peran IPTEK dalam Penanggulangan Kemiskinan", Makalah Seminar Nasional, Kabupaten Kendal, 13 November, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar dan IDEA, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H., 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani, 2005. *Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Bayu Media, Malang.